# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagau bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Seiring dengan perkembangan sektor public yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik pada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik (Stanbury, 2003). Kurangnya pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses

dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini karena disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Informasi laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan tersebut. Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan Negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Akuntabilitas pengelolaan keuangan).

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televise, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Mulyana, 2006)

Safitri (2009) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langusng tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa (1) Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan

sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut (Mulyana, 2006) Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dilakukan oleh Mulyana (2006) menunjukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik, aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Suatu proses inilah yang merupakan suatu media untuk terciptaknya transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah, sehingga tercipta suatu akuntabilitas pengelolaan daerah (Anies, 2012)

Wolk *et al* (2004) menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan berhubungan dengan keseluruhan informasi yang ada dalam laporan keuangan dan komunikasi tambahan yang terdiri dari catatan kaki, kejadian setelah tanggal necara, analisi manajemen dan informasi tambahan diluar biaya historis.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, fenomena yang terjadi pada kabupaten klaten adalah bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menetapkan kebupaten klaten dinilai oleh BPK wajar dengan pengecualian.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2012) yang berjudul "PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PEMALANG" Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, lokasi dan periode penelitian, dan juga pada penelitian saat ini terdapat penambahan variabel independen dan dependen yaitu tingkat pengungkapan dan transparansi. Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada public secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa public berhak mengetahui informasi tersebut.

## B. Rumusan masalah

**dalam penelitian ini adalah:**

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

3. Apakah tingkat pengungkapan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

## C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bukti empiris bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bukti empiris bahwa tingkat pengungkapan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

## D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan:

1. Teoritis

   penelitian dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan penyajian, aksesibilitas, tingkat pengungkapan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2. Praktisi

a. Bagi pemerintah Kabupaten Klaten, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penilaian apakah penyajian, aksesibiltas, tingkat pengungkapan, transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan secara benar.
b. Bagi pengguna laporan keuangan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk bahan pengambilan keputusan.
c. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.